

Lampiran

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang

Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

**BUKU STANDAR PK 03
DOKUMEN KUALIFIKASI**

DAFTAR ISI

BAB I	1
UMUM	1
BAB II	3
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	3
A. UMUM	3
1. PESERTA KUALIFIKASI.....	3
2. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN.....	4
3. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	5
4. SATU DOKUMEN KUALIFIKASI TIAP PESERTA	6
B. DOKUMEN KUALIFIKASI	6
5. PENGAMBILAN DOKUMEN KUALIFIKASI	6
6. ISI DOKUMEN KUALIFIKASI.....	6
7. BAHASA DOKUMEN KUALIFIKASI	6
8. PERUBAHAN DOKUMEN KUALIFIKASI.....	6
9. BERLAKUNYA KUALIFIKASI	7
10. BIAYA KUALIFIKASI	7
C. PENYIAPAN DAN PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	7
11. BENTUK DATA KUALIFIKASI.....	7
12. PAKTA INTEGRITAS.....	7
13. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	7
D. EVALUASI KUALIFIKASI	9
14. KERAHASIAAN PROSES.....	9
15. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI KUALIFIKASI	9
16. EVALUASI KUALIFIKASI	9
17. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.....	9
E. HASIL KUALIFIKASI	10
18. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI.....	10
19. PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI.....	10
20. KUALIFIKASI ULANG.....	10
21. UNDANGAN KEPADA PESERTA YANG LULUS KUALIFIKASI.....	10
BAB III	11
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	11
A. LINGKUP KUALIFIKASI	11
B. SUMBER DANA	11
C. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI.....	11
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI.....	11
BAB IV	13
BENTUK PAKTA INTEGRITAS	13
BAB V	15
BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	15
BAB VI	20
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI	20
A. DATA ADMINISTRASI	20
B. IZIN USAHA	20
C. SERTIFIKAT BADAN USAHA.....	20
D. IZIN ATAU SYARAT LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG DILELANGKAN).....	20
E. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA	20
F. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS)	20

G.	DATA KEUANGAN	20
H.	DATA PERSONIL INTI.....	21
I.	DATA PERALATAN.....	21
J.	DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN	21
K.	DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR.....	21
L.	DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN.....	21
M.	MODAL KERJA.....	21
N.	KEMITRAAN/KSO	21
	LAMPIRAN A - BENTUK SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)	22
	LAMPIRAN B - BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK.....	24
	BAB VIII.....	25
	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	25

BAB I UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan data kualifikasi.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- **Pekerjaan Konstruksi** : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;
 - **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **Pakta Integritas** : Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;
 - **PA** : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah;
 - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
 - **Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari ULP yang dibentuk dan ditetapkan oleh KPA yang penugasannya diatur oleh Kepala ULP untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - **Aplikasi SPSE** : aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang

terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui *website* LPSE;

- **Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh -pengguna aplikasi;
- **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

C. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :

1. Umum;
2. Instruksi Kepada Peserta;
3. Lembar Data Kualifikasi;
4. Pakta Integritas;
5. Formulir Isian Kualifikasi;
6. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
7. Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);
8. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

D. Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK.

E. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO.

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Peserta Kualifikasi

- 1.1 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.
- 1.2 Pelelangan paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 1.1 dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila:
 - a. pelelangan gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar; dan/atau
 - b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah.
- 1.3 Dalam hal peserta melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut.
- 1.4 Nilai pekerjaan di bawah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional.
- 1.5 Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti prakualifikasi harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- 1.6 Penyedia jasa yang bermitra/KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang dilelangkan dapat terdiri dari penyedia jasa konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
- 1.7 Mengisi Data Kualifikasi.
- 1.8 memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam LDK.
- 1.9 menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan

manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- 1.10 salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 1.11 memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
- 1.12 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Badan usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- 1.13 memiliki kemampuan pada klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk Badan usaha kecil serta kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk badan usaha non kecil;
- 1.14 memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
[Untuk pelelangan yang menggunakan metode pascakualifikasi maka isian kualifikasi untuk persyaratan peralatan dan personil mengacu persyaratan yang ada di dokumen pemilihan]
- 1.15 menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- 1.16 memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.
- 1.17 untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp2.500.000.000,00) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara.
- 1.18 mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- 1.19 untuk pekerjaan kompleks dapat dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). [badan usaha yang bermitra/KSO, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan "leadfirm"].

2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

- 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang

- bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 2.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/ melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 3.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud angka 3.1 di atas antara lain meliputi :
- a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;
 - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas;
 - c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya;
 - d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan;

- e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

4. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta

- 4.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.
- 4.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO DILARANG menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Kualifikasi

5. Pengambilan Dokumen Kualifikasi

- 5.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi.
- 5.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
- 5.3 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
- 5.4 Dalam hal pengambilan dokumen kualifikasi secara elektronik, dilakukan sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.

6. Isi Dokumen Kualifikasi

- 6.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 6.2 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.
- 6.3 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

7. Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

8. Perubahan Dokumen Kualifikasi

- 8.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.
- 8.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen

- Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
- 8.3 Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi.
- 9. Berlakunya Kualifikasi** Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang tercantum dalam LDK.
- 10. Biaya Kualifikasi**
- 10.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
- 10.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

C. Penyiapan dan Penyampaian Data Kualifikasi

- 11. Bentuk Data Kualifikasi** Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 12. Pakta Integritas**
- 12.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 12.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
- 13. Pengisian Data Kualifikasi**
- 13.1 Pengisian Data Kualifikasi
- a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
 - b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
 - c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I; dan
 - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- d. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
- 13.2 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
 - 13.3 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
 - 13.4 Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - 13.5 Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi.
 - 13.6 Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
 - 13.7 Aplikasi SPSE menolak setiap file yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan data kualifikasi.
 - 13.8 Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE.

D. Evaluasi Kualifikasi

- 14. Kerahasiaan Proses**
- 14.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.
 - 14.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan.
 - 14.3 Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan.
- 15. Klarifikasi Dan Konfirmasi Kualifikasi**
- 15.1 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
 - 15.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
 - 15.3 Hasil klarifikasi/ konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.
- 16. Evaluasi Kualifikasi**
- 16.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
 - 16.2 Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/KSO, Pakta Integritas telah diisi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO sebelum dilakukan evaluasi.
 - 16.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.
 - 16.4 Dalam hal Pelelangan Umum, apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
 - 16.5 Dalam hal Pelelangan Terbatas, apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan tetap dilanjutkan.
- 17. Pembuktian Kualifikasi**
- 17.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
 - 17.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut.
 - 17.3 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan

serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan.

- 17.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/atau mengecek keberadaan terhadap peralatan yang ditawarkan, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya.
- 17.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada pihak kepolisian atas pemalsuan tersebut.
- 17.6 Dalam hal Pelelangan Umum, apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 17.7 Dalam hal Pelelangan Terbatas, apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan tetap dilanjutkan.

E. Hasil Kualifikasi

- | | |
|---|---|
| 18. Penetapan Hasil Kualifikasi | Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi diinputkan pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi. |
| 19. Pengumuman Hasil Kualifikasi | Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDK. |
| 20. Kualifikasi Ulang | <ol style="list-style-type: none">21.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi.21.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses pelelangan. |
| 21. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi | Peserta yang masuk dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi diundang mengambil Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran. |

BAB III

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi**
1. Nama Pokja ULP : [diisi nama Pokja ULP, contoh : Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Satker Pembangunan Jalan]
 2. Alamat Pokja ULP :
 3. Website: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 4. a. Nama Paket Pekerjaan :
 - b. Uraian singkat pekerjaan:[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan]
- B. Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Tahun Anggaran
- C. Penyampaian Data Kualifikasi** Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.
- D. Persyaratan Kualifikasi**
1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, dan [isi sesuai dengan sertifikat lain yang dipersyaratkan];
 2. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
 3. memiliki pengalaman pada sub klasifikasi [diisi sesuai dengan sub klasifikasi sesuai/sejenis yang dilelangkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sebesar [diisi nilai total HPS];
 4. memiliki kemampuan menyediakan Personil¹ yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non kecil/menengah]; atau
 - b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil

¹ Personil yang dimaksud adalah personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk badan usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung, sedangkan untuk badan usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil).

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan diusulkan	Lama Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi Keahlian/ keterampilan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

[diisi tingkat pendidikan, jabatan, lama pengalaman kerja, profesi/ keahlian/ keterampilan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang dilelangkan]

5. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar [paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS];

6. memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini, yaitu:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa)
1.
2.
3.
Dst.

[diisi oleh Pokja ULP];

Dengan ketentuan kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa), peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan utama sebagai berikut:

- a. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah alat memenuhi persyaratan;
- b. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa beli (alat telah tersedia) untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dikecualikan untuk peralatan yang didesain khusus yang ditetapkan dalam dokumen lelang atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis.

7. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).

SPT Tahunan yang diminta untuk tahun [diisi dengan memperhatikan pemasukan penawaran dan peraturan perpajakan]

BAB IV

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertinda : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
k untuk sesuai dan cantumkan nama]
dan atas
nama
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertinda : PT/CV/Firma/ atau lainnya [pilih yang
k untuk sesuai dan cantumkan nama]
dan atas
nama
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota
kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

BAB V

BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

[Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE].

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KEMITRAAN/KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan :*[diisi sesuai jabatan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya]*

Bertindak : PT/CV/Firma/ atau lainnya *[pilih untuk dan atas nama yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*

Alamat :

No. Telepon :

No. Fax :

E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris *[sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka dicantumkan tambahan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/ atau : lainnya.)
2.	Status : <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat :
	No. Telepon :
	No. Fax :
	E-mail :
4.	Alamat Kantor Cabang :
	No. Telepon :
	No. Fax :
	E-mail :

B. Izin Usaha

1.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal
2.	Masa berlaku izin usaha	:
3.	Instansi pemberi izin usaha	:

C. Sertifikat Badan Usaha

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor b. Tanggal
2.	Masa berlaku	:
3.	Instansi pemberi	:

D. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan)

1.	Surat Izin atau syarat*)	:	a. Nomor b. Tanggal
2.	Masa berlaku izin atau syarat	:
3.	Instansi pemberi izin atau syarat	:

*) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (contoh: untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan/atau Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3))

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya		
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
2. Akta Perubahan Terakhir		
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

F. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir (SPT Tahunan)	:	No. Tanggal

H. Data Personil Inti (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Data Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub klasifikasi/subklasifikasi yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Data Pengalaman Perusahaan dalam 5 tahun terakhir (digunakan untuk penilaian SKP, KP = 6 atau KP = 1,2 N bagi paket pekerjaan non kecil)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak/Subkontrak		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

L. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (untuk perhitungan SKP = KP - jumlah paket yang sedang dikerjakan)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Rencana tanggal kontrak berakhir
			Nama	Alamat /Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8

M. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai : Rp (..... dalam huruf.....)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

PT/CV/Firma/atau lainnya
..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

BAB VI

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

I. Badan Usaha selain Kemitraan/KSO

Petunjuk pengisian untuk peserta bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide)

II. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Sertifikat Badan Usaha

1. Diisi nomor dan tanggal penerbitan.
2. Diisi dengan masa berlaku.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

D. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin atau syarat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

F. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak :

- a. Diisi dengan NPWP badan usaha.
- b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

H. Data Personil Inti

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilelangkan.

I. Data Peralatan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau *output* yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (dapat diisi sebagai milik sendiri/sewa beli/sewa yang tidak sedang digunakan dalam pelaksanaan) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perengkapan sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan utama yang dilelangkan sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan. Pokja apabila diperlukan dapat membuktikan keberadaan alat dan bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

J. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paket tertinggi, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

K. Data Pengalaman Perusahaan dalam 5 tahun terakhir

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

L. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, dan rencana tanggal kontrak berakhir.

M. Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

N. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

**LAMPIRAN A - BENTUK SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)**

CONTOH

[Kertas Segel]

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)**

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di pada tanggal 20....., maka kami:

..... [nama peserta 1]
..... [nama peserta 2]
..... [nama peserta 3]
..... [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama :
 - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah
 - b. Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

..... [nama peserta 1] sebesar% (..... persen)
..... [nama peserta 2] sebesar % (..... persen)
..... [nama peserta 3] sebesar% (..... persen)
..... [dan seterusnya] sebesar% (..... persen)
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada *[nama wakil peserta]* dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana *[nama peserta 1]* berdasarkan persetujuan tertulis (surat kuasa) dari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap (.....) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan, tahun

[Peserta 1]

[Peserta 2]

(.....)

(.....)

[Peserta 3]

[dst]

(.....)

(.....)

Catatan :

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel

LAMPIRAN B - BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

CONTOH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini: -
..... dalam jabatan selaku
..... dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama *[nama bank]*
berkedudukan di *[alamat]*

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan pekerjaan..... pada
dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Rekening :
Nama Penanggung Jawab :

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang, maka Bank bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan dana paling kurang Rp.
(terbilang).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di:
Pada tanggal :

.....
[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Dukungan
Keuangan Bank disarankan
untuk mengkonfirmasi ke
.....*[bank]*

BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi. Data kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
 2. memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha;
 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);
 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Badan usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 7. Memiliki kemampuan pada klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk badan usaha non kecil.
 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan [*untuk pelelangan metode pascakualifikasi, persyaratan peralatan dan personil mengacu kepada persyaratan yang tertera di dalam Dokumen Pemilihan*];
 9. menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya *lead firm*;
 11. untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp 2.500.000.000,00) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis/ kompleksitas yang setara, dengan ketentuan :
 - a. $KD = 3 \text{ NPt}$
NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

- b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
- c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub klasifikasi pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
- e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
- Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
- Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;

12. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

- a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
- KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk badan usaha kecil KP = 5
untuk badan usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N (dipilih nilai yang terbesar)
- N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;

13. untuk pekerjaan kompleks dapat dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) (misal : ISO 9001) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000) dan/atau Sertifikat Manajemen Lingkungan (misal : 14001). [badan usaha yang bermitra/KSO, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan "leadfirm"]

14. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :

- a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
- b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, angka 9, dan angka 12 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;
- c. persyaratan SBU spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan/KSO;
- d. khusus angka 8 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan/KSO;

